INTEGRASI PENANGGULANGAN BANJIR DALAM RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

M. Saleh Aidi
NPP. 33.0233
Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik
Email: alemsalehaidi@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ir. M. Nawawi, M.Si.
Email: m_nawawi@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem (Research Gap): *This research is motivated by the high frequency of recurring floods in Palembang City, which continue to cause significant social, economic, and environmental impacts on the community. Flooding not only disrupts community activities and public services but also results in economic losses and environmental degradation in urban areas. Although various flood management programs and policies have been implemented by the local government, these efforts have not been fully effective in reducing flood risks. One of the main causes is the lack of effective integration among sectors and institutions involved in flood management. In addition, there remains a gap between the planning outlined in regional development documents and the actual implementation of programs in the field. This condition highlights the importance of integrating flood management into regional development planning documents to ensure that programs are implemented in a more coordinated, systematic, and sustainable manner. Therefore, a comprehensive study is needed to examine the efforts of the local government in integrating flood management into development planning documents in Palembang City, as well as the supporting and inhibiting factors affecting the process.* ***Objective:*** *This study aims to describe and analyze the efforts of the Local Government in integrating flood management into development planning documents in Palembang City.* ***Method:*** *This study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through field observations, semi-structured interviews, and documentation. Informants were selected using a purposive sampling technique and consisted of representatives from the Regional Development Planning Agency (Bappeda), the Public Works and Spatial Planning Office (PUPR), the Regional Disaster Management Agency (BPBD), academics, non-governmental organizations (NGOs), and flood-affected communities. Data analysis was conducted using NVivo software through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.* ***Results/Findings:*** *The findings indicate that the integration of flood management into development planning documents in Palembang City encompasses five main dimensions: cross-sectoral integration, cross-regional integration, temporal integration, institutional integration, and budgetary integration. Flood management programs have been incorporated into various regional planning documents, including the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD), the Regional Government Work Plan (RKPD), and the Regional Spatial Plan (RTRW). Supporting factors include central government support, intersectoral cooperation, community participation, and policy continuity. However, implementation still faces several obstacles, such as strong sectoral ego among*

regional government agencies, limited integrated data, budget constraints, and leadership dynamics affecting program consistency. To address these challenges, the Palembang City Government has strengthened cross-sectoral coordination through Development Planning Consultation Forums (Musrenbang), developed integrated data information systems, and optimized alternative funding sources. ***Conclusion:*** *This study concludes that the integration of flood management into development planning documents in Palembang City has a relatively strong institutional and regulatory foundation. However, its implementation effectiveness still requires improved stakeholder coordination, stronger institutional commitment, better integrated data management, and consistent program implementation to enhance the city's resilience to flood disasters.*
Keywords: *Development planning integration; Flood management; Regional development*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Permasalahan dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya frekuensi kejadian banjir yang terjadi secara berulang di Kota Palembang dan menimbulkan berbagai dampak sosial, ekonomi, serta lingkungan bagi masyarakat. Banjir tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat dan pelayanan publik, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi serta menurunkan kualitas lingkungan perkotaan. Meskipun berbagai program dan kebijakan penanggulangan banjir telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, upaya tersebut belum sepenuhnya mampu mengurangi risiko banjir secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah belum terintegrasinya pelaksanaan program secara efektif antar sektor dan antar lembaga yang terlibat. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara perencanaan yang tertuang dalam dokumen pembangunan daerah dengan implementasi program di lapangan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya integrasi penanggulangan banjir ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah agar pelaksanaan program menjadi lebih terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengkaji bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan penanggulangan banjir ke dalam dokumen perencanaan pembangunan di Kota Palembang beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan penanggulangan banjir ke dalam dokumen perencanaan pembangunan di Kota Palembang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri atas perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat terdampak banjir. Analisis data dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak NVivo melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi penanggulangan banjir dalam dokumen perencanaan pembangunan di Kota Palembang telah mencakup lima dimensi utama, yaitu integrasi lintas sektor, lintas wilayah, antarwaktu, kelembagaan, dan anggaran. Program penanggulangan banjir telah diakomodasi dalam berbagai dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD, RKPD, dan RTRW. Faktor pendukung integrasi tersebut meliputi dukungan pemerintah pusat, kerja sama lintas sektor, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan kebijakan pembangunan. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain tingginya ego sektoral antar organisasi perangkat daerah, keterbatasan data yang terintegrasi, keterbatasan anggaran, serta dinamika kepemimpinan yang memengaruhi

konsistensi program. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Kota Palembang melakukan penguatan koordinasi lintas sektor melalui forum Musrenbang, pengembangan sistem informasi data terpadu, serta optimalisasi sumber pendanaan alternatif. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi penanggulangan banjir ke dalam dokumen perencanaan pembangunan di Kota Palembang telah memiliki dasar kelembagaan dan regulasi yang cukup kuat. Namun, efektivitas implementasinya masih memerlukan peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, penguatan komitmen kelembagaan, penyediaan data yang terintegrasi, serta konsistensi pelaksanaan program secara berkelanjutan guna mewujudkan ketahanan Kota Palembang terhadap risiko bencana banjir.
Kata kunci: Integrasi perencanaan; Penanggulangan banjir; Pembangunan daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penanggulangan bencana merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pembangunan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga harus mampu mengurangi risiko bencana yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Salah satu bencana yang paling sering terjadi di Indonesia adalah banjir. Banjir merupakan bencana hidrometeorologi yang terjadi akibat meluapnya air sehingga menggenangi wilayah yang pada kondisi normal tidak tergenang. Kejadian banjir dapat menimbulkan berbagai dampak, baik berupa kerugian ekonomi, kerusakan infrastruktur, gangguan aktivitas sosial masyarakat, maupun penurunan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, upaya penanggulangan banjir perlu menjadi bagian yang terintegrasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah agar pembangunan yang dilaksanakan mampu meningkatkan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana (Firdausy & Alia, 2024).

Di Indonesia, banjir masih menjadi bencana yang paling dominan dibandingkan jenis bencana lainnya. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa banjir secara konsisten menempati peringkat tertinggi dalam jumlah kejadian bencana setiap tahunnya (Rosyida & Nurmasari,2019). Tingginya frekuensi banjir dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor alam maupun faktor aktivitas manusia. Curah hujan yang tinggi, perubahan iklim, serta fenomena cuaca ekstrem menjadi faktor alam yang meningkatkan potensi banjir. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk, urbanisasi yang pesat, alih fungsi lahan, berkurangnya kawasan resapan air, serta lemahnya pengelolaan lingkungan turut memperbesar risiko terjadinya banjir di berbagai daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan banjir tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan teknis semata, tetapi memerlukan pendekatan yang terintegrasi dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, pengurangan risiko bencana perlu diarusutamakan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan agar setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu mempertimbangkan aspek mitigasi dan adaptasi terhadap bencana. Integrasi penanggulangan banjir dalam dokumen perencanaan pembangunan menjadi penting karena berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan program, pengalokasian anggaran, koordinasi antarinstansi, serta pelaksanaan kegiatan pembangunan yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana. Melalui integrasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun kebijakan yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan dalam mengurangi dampak banjir terhadap masyarakat.

Kota Palembang merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kejadian banjir. Secara geografis, Kota Palembang didominasi oleh wilayah dataran rendah yang dialiri Sungai Musi beserta anak-anak sungainya. Kondisi geografis tersebut menjadikan Kota Palembang memiliki kerentanan alami terhadap genangan dan banjir. Selain itu, perkembangan kawasan perkotaan yang semakin pesat, peningkatan jumlah penduduk, pembangunan permukiman di kawasan bantaran sungai, serta perubahan tata guna lahan telah menyebabkan berkurangnya daerah resapan air dan meningkatnya risiko banjir perkotaan (Kamil et al., 2023).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang Tahun 2025, kejadian banjir di Kota Palembang masih terjadi secara berulang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 17 kejadian banjir yang berdampak pada 3.562 kepala keluarga di sembilan kecamatan dengan estimasi kerugian mencapai Rp28,5 miliar. Jumlah kejadian tersebut meningkat menjadi 19 kejadian pada tahun 2022 yang berdampak pada 4.126 kepala keluarga di sepuluh kecamatan dengan estimasi kerugian sebesar Rp31,8 miliar. Meskipun jumlah kejadian banjir sempat menurun pada tahun 2023 menjadi 14 kejadian, banjir kembali terjadi sebanyak 16 kejadian pada tahun 2024 dan 15 kejadian pada tahun 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa banjir masih menjadi permasalahan yang terjadi secara berulang dan memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat Kota Palembang.

Selain besarnya dampak yang ditimbulkan, upaya penanggulangan banjir juga memerlukan dukungan anggaran yang memadai. Data APBD Kota Palembang menunjukkan bahwa alokasi anggaran penanggulangan banjir selama periode 2021–2025 berada pada kisaran 1 hingga 1,5 persen dari total APBD daerah. Meskipun terdapat peningkatan anggaran dari Rp88 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp115 miliar pada tahun 2025, besarnya kerugian akibat banjir yang mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahun menunjukkan bahwa penanggulangan banjir masih menjadi tantangan penting dalam pembangunan daerah. Kondisi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan risiko banjir tidak cukup hanya melalui peningkatan anggaran, tetapi juga memerlukan integrasi yang kuat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Penelitian terdahulu mengenai banjir di Kota Palembang umumnya lebih banyak membahas aspek teknis, seperti sistem drainase, pengelolaan daerah aliran sungai, penyebab banjir, kerentanan wilayah, serta pembangunan infrastruktur pengendalian banjir. Namun, kajian yang secara khusus membahas bagaimana penanggulangan banjir diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah masih relatif terbatas. Padahal, integrasi dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memiliki peran penting dalam memastikan sinkronisasi program, koordinasi lintas sektor, pengalokasian anggaran, serta keberlanjutan pelaksanaan program penanggulangan banjir. Keterbatasan penelitian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa integrasi penanggulangan banjir dalam rencana pembangunan daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap bencana. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mengintegrasikan penanggulangan banjir ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses integrasi tersebut, serta solusi yang dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai praktik integrasi

penanggulangan banjir dalam perencanaan pembangunan daerah sekaligus menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Palembang dalam meningkatkan efektivitas kebijakan penanggulangan banjir secara berkelanjutan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penelitian mengenai penanggulangan bencana banjir dan perencanaan pembangunan daerah telah banyak dilakukan, khususnya yang membahas strategi mitigasi banjir, pengelolaan risiko bencana, tata ruang wilayah, serta peran pemerintah dalam mengurangi dampak bencana. Sebagian besar penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan banjir sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi, ketersediaan infrastruktur pengendalian banjir, partisipasi masyarakat, serta dukungan kebijakan pemerintah. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya lebih berfokus pada aspek teknis penanganan banjir dan belum banyak mengkaji bagaimana upaya penanggulangan banjir diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai instrumen strategis pembangunan jangka panjang.

Di sisi lain, penelitian mengenai perencanaan pembangunan daerah lebih banyak membahas sinkronisasi kebijakan, efektivitas perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan. Kajian tersebut umumnya menitikberatkan pada proses penyusunan dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), tanpa secara khusus mengkaji integrasi isu kebencanaan, khususnya penanggulangan banjir, ke dalam dokumen-dokumen tersebut. Padahal, integrasi kebijakan penanggulangan banjir dalam perencanaan pembangunan merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa upaya pengurangan risiko bencana menjadi bagian dari agenda pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu, penelitian terkait penanggulangan banjir umumnya lebih banyak menyoroti faktor-faktor penyebab banjir, dampak yang ditimbulkan, serta upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat. Sementara itu, kajian yang menghubungkan aspek penanggulangan banjir dengan dimensi perencanaan pembangunan, seperti integrasi lintas sektor, lintas wilayah, antarwaktu, kelembagaan, dan anggaran, masih relatif terbatas. Padahal, keberhasilan penanggulangan banjir tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program teknis, tetapi juga oleh sejauh mana program tersebut terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

Kesenjangan penelitian lainnya terlihat pada masih terbatasnya studi yang secara khusus mengkaji proses integrasi penanggulangan banjir dalam dokumen perencanaan pembangunan pada tingkat pemerintah daerah, khususnya di Kota Palembang. Sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan pada wilayah lain atau hanya berfokus pada aspek teknis pengendalian banjir, sehingga belum mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upaya integrasi kebijakan penanggulangan banjir dalam perencanaan pembangunan di Kota Palembang yang memiliki karakteristik geografis, hidrologis, dan tata kelola pemerintahan yang berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut, *research gap* dalam penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang menganalisis secara mendalam upaya Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan penanggulangan banjir ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, termasuk faktor pendukung, faktor penghambat, dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala dalam proses integrasi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian yang ada sekaligus memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian perencanaan

pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang tangguh terhadap bencana banjir di Kota Palembang.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena banjir merupakan salah satu permasalahan yang terjadi secara berulang di Kota Palembang dan memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Kejadian banjir yang terus berulang tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat dan pelayanan publik, tetapi juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, serta menurunkan kualitas lingkungan perkotaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan banjir tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan yang terintegrasi melalui perencanaan pembangunan daerah yang mampu mengakomodasi aspek pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana secara berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi penanggulangan banjir ke dalam dokumen perencanaan pembangunan menjadi isu yang penting untuk dikaji guna mendukung pembangunan daerah yang tangguh terhadap bencana.

Urgensi penelitian ini juga terletak pada kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik, perencanaan pembangunan, dan manajemen bencana. Selama ini, penelitian mengenai banjir lebih banyak berfokus pada aspek teknis pengendalian banjir, faktor penyebab terjadinya banjir, maupun dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana penanggulangan banjir diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk berbagai faktor pendukung, faktor penghambat, dan solusi yang diterapkan dalam proses integrasi tersebut, masih relatif terbatas. Padahal, integrasi kebijakan penanggulangan banjir dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu strategi penting untuk memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya kajian mengenai integrasi kebijakan publik, perencanaan pembangunan daerah, dan pengurangan risiko bencana.

Secara praktis, penelitian ini penting bagi Pemerintah Kota Palembang, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta instansi terkait lainnya sebagai bahan masukan dalam meningkatkan efektivitas integrasi penanggulangan banjir ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi aktual integrasi kebijakan penanggulangan banjir, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya, serta alternatif solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor, efektivitas perencanaan, dan keberlanjutan program penanggulangan banjir di Kota Palembang.

Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka akan terdapat keterbatasan informasi dan pemahaman mengenai sejauh mana upaya integrasi penanggulangan banjir telah dilaksanakan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah serta berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan perencanaan pembangunan yang kurang responsif terhadap risiko bencana, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kurang optimalnya pelaksanaan program penanggulangan banjir. Akibatnya, upaya mewujudkan pembangunan daerah

yang berkelanjutan, aman, dan tangguh terhadap bencana banjir di Kota Palembang akan sulit tercapai secara optimal.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penanggulangan bencana banjir telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti dengan fokus yang beragam, mulai dari aspek mitigasi bencana, implementasi kebijakan, hingga efektivitas program penanggulangan banjir yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan banjir sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi, ketersediaan sumber daya, dukungan kebijakan, partisipasi masyarakat, serta kapasitas kelembagaan dalam menjalankan program penanggulangan bencana. Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek implementasi kebijakan dan pelaksanaan program penanggulangan banjir, sementara kajian yang secara khusus membahas integrasi penanggulangan banjir ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah masih relatif terbatas.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulaeha et al. (2022) berjudul Mitigasi Bencana Perspektif Kebijakan Publik dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kalimantan Selatan bertujuan untuk menganalisis kebijakan publik dalam upaya mitigasi bencana banjir serta menilai efektivitas implementasinya. Penelitian tersebut menggunakan teori kebijakan publik dan manajemen bencana dengan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mitigasi banjir masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya partisipasi masyarakat, dan keterbatasan sumber daya. Meskipun demikian, penelitian tersebut juga menunjukkan adanya peluang untuk memperkuat regulasi dan sinergi lintas sektor dalam penanggulangan banjir. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai penanggulangan banjir dalam perspektif kebijakan publik. Perbedaannya, penelitian Zulaeha et al. berfokus pada evaluasi implementasi mitigasi banjir di Kalimantan Selatan, sedangkan penelitian ini berfokus pada integrasi penanggulangan banjir ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kota Palembang.

Selanjutnya, penelitian Tenau (2025) yang berjudul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan banjir yang dilakukan oleh BPBD Kota Sorong dengan fokus pada pemanfaatan teknologi dalam mitigasi bencana. Penelitian ini menggunakan teori manajemen bencana dengan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kota Sorong telah memanfaatkan berbagai teknologi sebagai alat bantu mitigasi banjir, namun pemanfaatannya belum optimal akibat keterbatasan anggaran yang berdampak pada minimnya perawatan dan pengadaan teknologi baru. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas implementasi kebijakan penanggulangan banjir. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana Tenau menitikberatkan pada aspek teknologi dalam mitigasi banjir, sedangkan penelitian ini mengkaji integrasi penanggulangan banjir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kota Palembang.

Penelitian Saputro (2023) berjudul Efektivitas Program Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk mengetahui efektivitas program penanggulangan banjir serta upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan banjir. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas menurut Duncan dengan metode deskriptif

kualitatif dan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program penanggulangan banjir di Kota Tanjungpinang telah berjalan cukup efektif, meskipun masih terdapat beberapa hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurang memadainya sarana serta prasarana pendukung. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas penanggulangan banjir melalui kebijakan dan program pemerintah daerah. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana Saputro menilai efektivitas program penanggulangan banjir, sedangkan penelitian ini berfokus pada proses integrasi penanggulangan banjir ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Maharani & Suhendi (2025) berjudul "Mitigasi Bencana Banjir melalui Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan" mengkaji upaya mitigasi banjir melalui pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai sarana pengurangan risiko banjir di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan RTH sebagai upaya mitigasi banjir telah berjalan cukup baik melalui penanaman pohon, pengembangan fasilitas ruang hijau, dan keberadaan kolam retensi. Namun, efektivitasnya masih belum optimal karena terkendala keterbatasan lahan, belum tercapainya target luas RTH, keterbatasan pendanaan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan RTH. Penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek mitigasi banjir melalui pemanfaatan ruang terbuka hijau dan strategi pengelolaannya. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada integrasi penanggulangan banjir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya bagaimana upaya penanggulangan banjir diakomodasi dalam RPJMD, RKPD, dan RTRW serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses integrasi kebijakan tersebut.

Penelitian yang dilakukan Sanahan dan Simbolon (2024) dalam penelitian berjudul Tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan mengkaji efektivitas kolaborasi antarinstansi pemerintah dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan banjir sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antarinstansi pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat. Penelitian tersebut menemukan bahwa upaya teknis dan nonteknis dalam penanggulangan banjir perlu dilaksanakan secara terintegrasi dengan dukungan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan. Program kolaboratif yang melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah dinilai telah berjalan cukup efektif, meskipun masih diperlukan optimalisasi koordinasi dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Penelitian ini berfokus pada aspek tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan penanggulangan banjir, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada integrasi penanggulangan banjir ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk bagaimana isu banjir diakomodasi dalam RPJMD, RKPD, dan RTRW serta faktor-faktor yang memengaruhi proses integrasi tersebut.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian masih membahas penanggulangan banjir dari aspek mitigasi, implementasi kebijakan, pemanfaatan teknologi, maupun efektivitas program yang dijalankan pemerintah daerah. Sementara

itu, penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana penanggulangan banjir diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk faktor pendukung, faktor penghambat, dan solusi yang dilakukan dalam proses integrasi tersebut, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena berfokus pada analisis integrasi penanggulangan banjir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kota Palembang, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian perencanaan pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana serta menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan penanggulangan banjir secara berkelanjutan.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari sebagian besar penelitian terdahulu yang membahas penanggulangan banjir. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada aspek mitigasi bencana, implementasi kebijakan, efektivitas program penanggulangan banjir, pemanfaatan teknologi, tata kelola kolaboratif, maupun pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai upaya pengurangan risiko banjir. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji integrasi penanggulangan banjir ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Fokus tersebut menjadi penting karena keberhasilan penanggulangan banjir tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program di lapangan, tetapi juga oleh sejauh mana isu banjir diakomodasi secara sistematis dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan.

Kebaruan penelitian ini juga terletak pada konteks kajian yang berfokus pada Kota Palembang sebagai salah satu kota yang menghadapi permasalahan banjir secara berulang akibat faktor geografis, hidrologis, perkembangan kawasan perkotaan, dan perubahan tata guna lahan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan di Kalimantan Selatan, Kota Sorong, maupun Kota Tanjungpinang, penelitian ini mengkaji kondisi empiris Kota Palembang dengan karakteristik wilayah dan tantangan pembangunan yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai upaya pemerintah daerah dalam mengintegrasikan penanggulangan banjir ke dalam perencanaan pembangunan di tingkat kota (Alshaikh et al,2023).

Dari segi fokus kajian, penelitian ini tidak hanya membahas pelaksanaan program penanggulangan banjir, tetapi juga menganalisis bagaimana proses integrasi penanggulangan banjir dilakukan dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor pendukung, faktor penghambat, serta solusi yang dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan integrasi kebijakan tersebut (Al-Mughairi & Bhaskar, 2025). Kajian semacam ini masih relatif jarang ditemukan dalam penelitian terdahulu yang lebih banyak berorientasi pada evaluasi program atau implementasi kebijakan secara sektoral.

Dari segi pendekatan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat terdampak banjir. Analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak NVivo untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif

mengenai proses integrasi penanggulangan banjir dalam perencanaan pembangunan daerah (Saad et al,2024).

Selanjutnya, dari segi teori dan pendekatan konseptual, penelitian ini menggunakan konsep integrasi perencanaan pembangunan yang menekankan keterpaduan antar sektor, antar wilayah, antar waktu, kelembagaan, dan anggaran dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat penanggulangan banjir tidak hanya sebagai isu kebencanaan semata, tetapi juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada pengurangan risiko bencana (Bonfanti et al,2023).

Dengan demikian, kebaruan ilmiah (*scientific novelty*) penelitian ini terletak pada analisis integrasi penanggulangan banjir ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Palembang, pengkajian faktor pendukung dan penghambat proses integrasi, serta identifikasi solusi yang dilakukan pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi kebijakan penanggulangan banjir dalam kerangka pembangunan daerah yang berkelanjutan dan tangguh terhadap bencana.

1.6. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis integrasi penanggulangan banjir dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, yang meliputi upaya Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan penanggulangan banjir ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi proses integrasi tersebut, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan guna meningkatkan efektivitas integrasi penanggulangan banjir dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Palembang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin mendeskripsikan dan menganalisis integrasi penanggulangan banjir dalam rencana pembangunan daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses integrasi kebijakan, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta berbagai dinamika yang terjadi dalam penyusunan dan pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali informasi secara komprehensif dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dan penanggulangan banjir sehingga diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai fenomena yang diteliti.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan terhadap informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam proses integrasi penanggulangan banjir dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Palembang. Informan penelitian terdiri atas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palembang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang, Kepala Bidang pada BPBD atau Dinas terkait, akademisi atau ahli tata ruang, perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau komunitas peduli lingkungan,

serta masyarakat yang terdampak banjir. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD, RKPD, RTRW, laporan instansi terkait, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, serta berbagai dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

Penelitian ini menggunakan konsep Integrasi Pembangunan menurut Mardiasmo (2018) yang meliputi lima dimensi utama, yaitu integrasi lintas sektor, integrasi lintas wilayah, integrasi antarwaktu, integrasi kelembagaan, dan integrasi anggaran. Kelima dimensi tersebut digunakan sebagai fokus analisis untuk melihat sejauh mana penanggulangan banjir telah terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Palembang. Indikator yang digunakan meliputi sinkronisasi program penanggulangan banjir, koordinasi antarinstansi, keterpaduan perencanaan, kerja sama antarwilayah, keberlanjutan program, kolaborasi antarlembaga, pembagian peran dan tanggung jawab, serta sinkronisasi dan efisiensi pendanaan penanggulangan banjir.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi. Pedoman wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian dan dimensi integrasi pembangunan yang digunakan sebagai landasan analisis. Selain itu, observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi lapangan yang berkaitan dengan permasalahan banjir dan pelaksanaan program penanggulangan banjir di Kota Palembang. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan bantuan perangkat lunak NVivo. Penggunaan NVivo bertujuan untuk mempermudah proses pengelompokan data, pengkodean, identifikasi tema, analisis hubungan antar kategori, serta penyajian hasil penelitian secara sistematis. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Tahapan tersebut dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga diperoleh kesimpulan yang mampu menjawab tujuan penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan lokasi utama penelitian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palembang. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada peran strategis Bappeda sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyusunan, koordinasi, dan integrasi kebijakan pembangunan daerah, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan banjir. Waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun Akademik 2025/2026 yang mencakup tahapan persiapan penelitian, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis integrasi penanggulangan banjir dalam rencana pembangunan daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Pembahasan difokuskan pada upaya Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan penanggulangan banjir ke dalam

dokumen perencanaan pembangunan daerah, faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi proses integrasi tersebut, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Fokus penelitian diarahkan untuk mengetahui sejauh mana penanggulangan banjir telah diakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana implementasi integrasi tersebut dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan di Kota Palembang.

Dalam menganalisis fenomena tersebut, peneliti menggunakan konsep integrasi perencanaan pembangunan yang menekankan pentingnya keterpaduan antar sektor, antar wilayah, antar waktu, kelembagaan, dan anggaran dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Konsep ini digunakan untuk melihat bagaimana isu penanggulangan banjir diintegrasikan ke dalam proses perencanaan pembangunan sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan tangguh terhadap bencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses integrasi penanggulangan banjir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Palembang.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat yang terdampak banjir. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD, RKPD, RTRW, laporan instansi terkait, serta dokumen pendukung lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan temuan yang sistematis dan komprehensif.

3.1. Upaya Pemerintah Daerah dalam Mengintegrasikan Penanggulangan Banjir ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang

Integrasi penanggulangan banjir ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah Kota Palembang dalam mengurangi risiko bencana sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Integrasi tersebut dilakukan dengan memasukkan isu penanggulangan banjir ke dalam berbagai dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Langkah ini dilakukan agar program penanggulangan banjir tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, tetapi menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah yang melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen, Pemerintah Kota Palembang telah berupaya mengintegrasikan penanggulangan banjir melalui lima dimensi utama integrasi pembangunan, yaitu integrasi lintas sektor, integrasi lintas wilayah, integrasi antarwaktu, integrasi kelembagaan, dan integrasi anggaran. Integrasi lintas sektor dilakukan melalui koordinasi antara Bappeda, BPBD, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, serta instansi terkait lainnya dalam menyusun program dan kegiatan yang mendukung pengurangan risiko banjir. Melalui koordinasi tersebut, berbagai program pembangunan dapat diarahkan agar selaras dengan tujuan penanggulangan banjir.

Pada aspek integrasi lintas wilayah, Pemerintah Kota Palembang melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang memiliki keterkaitan wilayah aliran sungai serta kawasan yang berpotensi menimbulkan dampak banjir. Hal ini dilakukan mengingat permasalahan banjir tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi wilayah Kota Palembang, tetapi juga oleh kondisi lingkungan dan tata ruang pada wilayah sekitarnya.

Integrasi antarwaktu diwujudkan melalui penyelarasan program penanggulangan banjir dalam dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Dengan demikian, program penanggulangan banjir dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan tidak hanya bersifat sementara atau insidental. Selain itu, integrasi kelembagaan dilakukan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antarorganisasi perangkat daerah sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif.

Sementara itu, integrasi anggaran dilakukan dengan mengalokasikan pendanaan penanggulangan banjir dalam berbagai program pembangunan daerah serta memanfaatkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan sumber pendanaan lainnya. Melalui integrasi anggaran, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa program penanggulangan banjir memiliki dukungan sumber daya yang memadai untuk dilaksanakan secara berkelanjutan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara formal penanggulangan banjir telah terakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Palembang. Namun demikian, implementasi integrasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, komitmen kelembagaan, dan sinergi antar pemangku kepentingan agar tujuan integrasi penanggulangan banjir dalam perencanaan pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.

3.2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Integrasi Penanggulangan Banjir dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang

Faktor pendukung dan faktor penghambat merupakan aspek penting yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan integrasi penanggulangan banjir dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Palembang. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan aplikasi NVivo terhadap hasil wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian, ditemukan bahwa efektivitas integrasi penanggulangan banjir tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dokumen perencanaan yang mengakomodasi isu banjir, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor kelembagaan, koordinasi, partisipasi masyarakat, ketersediaan sumber daya, serta konsistensi kebijakan yang mendukung pelaksanaannya.

Hasil *coding* NVivo menunjukkan bahwa terdapat dua kelompok faktor utama yang memengaruhi pelaksanaan integrasi penanggulangan banjir, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kerja sama lintas sektor dan lintas wilayah, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan kebijakan dan perencanaan. Sementara itu, faktor penghambat meliputi ego sektoral antar organisasi perangkat daerah, keterbatasan data yang terintegrasi, keterbatasan anggaran, serta perubahan kebijakan dan kepemimpinan yang berpengaruh terhadap konsistensi pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Bappeda, Dinas PUPR, BPBD, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat terdampak banjir, diketahui bahwa dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam mendukung integrasi penanggulangan banjir. Dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk bantuan pendanaan, program pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, bantuan teknis, serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah yang lebih tinggi. Dukungan tersebut menjadi sangat penting karena kebutuhan pendanaan untuk program penanggulangan banjir relatif besar dan sering kali melebihi kemampuan keuangan daerah.

Selain itu, kerja sama lintas sektor dan lintas wilayah juga menjadi faktor pendukung yang berpengaruh terhadap keberhasilan integrasi. Penanggulangan banjir merupakan permasalahan yang bersifat multidimensional sehingga memerlukan keterlibatan berbagai instansi dan pemangku kepentingan. Koordinasi yang baik antara Bappeda, BPBD, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Balai Besar Wilayah Sungai, serta pemerintah provinsi dan daerah sekitar memungkinkan pelaksanaan program penanggulangan banjir dilakukan secara lebih terpadu. Kerja sama tersebut juga mendukung sinkronisasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan drainase, pengendalian banjir, dan penataan ruang wilayah.

Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor pendukung yang tidak kalah penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat turut berkontribusi dalam berbagai kegiatan mitigasi dan penanggulangan banjir, seperti kegiatan gotong royong membersihkan saluran drainase, mengikuti sosialisasi kebencanaan, serta berpartisipasi dalam kegiatan tanggap darurat ketika banjir terjadi. Keterlibatan masyarakat menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan banjir tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai pihak yang secara langsung merasakan dampak banjir.

Faktor pendukung lainnya adalah keberadaan kebijakan dan dokumen perencanaan yang berkelanjutan. RPJMD, RKPD, dan RTRW menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa program penanggulangan banjir tetap menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah. Keberadaan dokumen tersebut memungkinkan program penanggulangan banjir dilaksanakan secara berkesinambungan dari satu periode perencanaan ke periode berikutnya sehingga tujuan pembangunan yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana dapat tercapai secara lebih optimal.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan integrasi penanggulangan banjir dalam perencanaan pembangunan daerah. Salah satu faktor yang paling dominan adalah ego sektoral antar organisasi perangkat daerah. Berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat kecenderungan masing-masing instansi untuk lebih berfokus pada program dan kepentingan sektoralnya sendiri dibandingkan dengan membangun keterpaduan program secara menyeluruh. Kondisi ini menyebabkan koordinasi antarinstansi belum berjalan secara optimal dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih program maupun ketidaksinkronan dalam pelaksanaan kegiatan.

Faktor penghambat berikutnya adalah keterbatasan data yang terintegrasi. Data yang digunakan oleh masing-masing instansi masih belum sepenuhnya terhubung dalam satu sistem informasi yang terpadu. Akibatnya, proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan penyusunan program penanggulangan banjir sering menghadapi kendala dalam memperoleh data yang akurat, mutakhir, dan dapat digunakan bersama. Keterbatasan data tersebut berdampak pada kurang optimalnya sinkronisasi program dan kebijakan antarinstansi yang terlibat.

Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Program penanggulangan banjir memerlukan biaya yang besar, baik untuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, pemeliharaan sistem drainase, pembangunan kolam retensi, maupun kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Sementara itu, kemampuan anggaran daerah yang terbatas menyebabkan beberapa program harus dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Faktor penghambat lainnya adalah perubahan kebijakan dan kepemimpinan. Pergantian kepala daerah maupun perubahan arah kebijakan pembangunan berpotensi memengaruhi prioritas program

yang telah direncanakan sebelumnya. Kondisi ini dapat menghambat keberlanjutan program penanggulangan banjir yang membutuhkan komitmen jangka panjang dan konsistensi pelaksanaan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kelembagaan yang mampu menjaga kesinambungan program meskipun terjadi perubahan kebijakan maupun pergantian kepemimpinan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan integrasi penanggulangan banjir dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Palembang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor pendukung berupa dukungan pemerintah, kerja sama lintas sektor dan lintas wilayah, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan kebijakan menjadi modal penting dalam mendorong keberhasilan integrasi. Namun demikian, masih terdapat berbagai hambatan yang perlu diatasi, terutama terkait ego sektoral, keterbatasan data terintegrasi, keterbatasan anggaran, dan perubahan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, serta komitmen yang berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan agar integrasi penanggulangan banjir dalam perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

3.3. Upaya yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kota Palembang untuk Mengatasi Faktor Penghambat dalam Rangka Memperkuat Integrasi Penanggulangan Banjir ke dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Keberhasilan integrasi penanggulangan banjir dalam perencanaan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh adanya faktor pendukung, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai hambatan yang muncul selama proses perencanaan dan pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan yang terdiri atas Bappeda, Dinas PUPR, BPBD, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat terdampak banjir, diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kota Palembang telah melakukan berbagai upaya strategis untuk mengatasi faktor-faktor penghambat yang selama ini memengaruhi efektivitas integrasi penanggulangan banjir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Hasil analisis data menggunakan aplikasi NVivo menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah daerah berpusat pada beberapa strategi utama, yaitu peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, penguatan sistem data dan informasi, optimalisasi pendanaan, serta penguatan keberlanjutan program penanggulangan banjir. Strategi tersebut dilakukan sebagai respons terhadap berbagai kendala yang ditemukan dalam proses integrasi, seperti ego sektoral antar organisasi perangkat daerah, keterbatasan data yang terintegrasi, keterbatasan anggaran, serta perubahan kebijakan dan kepemimpinan yang berpotensi memengaruhi konsistensi program.

Salah satu upaya utama yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang adalah meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Bappeda dan Dinas PUPR, pemerintah daerah secara rutin menyelenggarakan berbagai forum koordinasi, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), rapat koordinasi antar organisasi perangkat daerah, forum teknis, serta pertemuan lintas instansi yang membahas isu penanggulangan banjir. Forum-forum tersebut menjadi sarana untuk menyelaraskan program, memperkuat komunikasi antarinstansi, serta mengurangi potensi tumpang tindih kegiatan. Upaya ini juga diarahkan untuk mengurangi ego sektoral yang selama ini menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan integrasi penanggulangan banjir.

Selain memperkuat koordinasi, pemerintah daerah juga melakukan penguatan sistem data dan informasi sebagai upaya mengatasi keterbatasan data yang selama ini menghambat proses perencanaan. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah berupaya mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi guna mendukung penyediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat diakses oleh seluruh instansi yang terkait dengan penanggulangan banjir. Pengumpulan, pembaruan, dan verifikasi data dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penyusunan program dan pengambilan keputusan memiliki tingkat validitas yang tinggi. Selain itu, pertukaran data antarinstansi juga terus didorong agar proses sinkronisasi kebijakan dan program dapat berjalan lebih efektif.

Upaya berikutnya yang dilakukan pemerintah daerah adalah optimalisasi pendanaan program penanggulangan banjir. Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Kota Palembang berupaya mengalokasikan anggaran secara lebih efektif dengan memprioritaskan program-program yang berkaitan dengan pengendalian banjir, seperti pembangunan dan rehabilitasi drainase, normalisasi sungai, pembangunan kolam retensi, serta peningkatan infrastruktur pengendalian banjir lainnya. Di samping itu, pemerintah daerah juga berupaya memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melalui berbagai program bantuan serta skema pendanaan yang tersedia. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan kemampuan fiskal daerah dalam memenuhi seluruh kebutuhan pendanaan penanggulangan banjir.

Pemerintah daerah juga berupaya menjaga keberlanjutan program penanggulangan banjir agar tetap berjalan meskipun terjadi perubahan kebijakan maupun pergantian kepemimpinan. Upaya tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan program penanggulangan banjir ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD, RKPD, dan RTRW. Dengan dimasukkannya program-program tersebut ke dalam dokumen perencanaan resmi, pelaksanaan program memiliki dasar hukum dan arah kebijakan yang lebih kuat sehingga dapat terus dilanjutkan pada periode pembangunan berikutnya. Strategi ini dinilai penting untuk menjaga konsistensi program dan memastikan bahwa upaya penanggulangan banjir tidak bersifat sementara, tetapi menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan visualisasi hasil analisis NVivo, terlihat bahwa penguatan integrasi penanggulangan banjir menjadi inti dari seluruh upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Peningkatan koordinasi, penguatan data, optimalisasi pendanaan, dan keberlanjutan program saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan strategi dalam memperkuat efektivitas integrasi penanggulangan banjir ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Melalui berbagai upaya tersebut, Pemerintah Kota Palembang menunjukkan komitmen yang cukup kuat untuk mengatasi berbagai hambatan yang selama ini memengaruhi pelaksanaan integrasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang telah mengarah pada penguatan integrasi penanggulangan banjir dalam perencanaan pembangunan daerah melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, optimalisasi sumber pendanaan, serta penguatan keberlanjutan program. Meskipun demikian, berbagai upaya tersebut masih memerlukan penyempurnaan dan pengembangan secara berkelanjutan agar pelaksanaan integrasi penanggulangan banjir dapat berjalan lebih efektif, konsisten, dan mampu mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang tangguh terhadap risiko bencana banjir.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi penanggulangan banjir dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Palembang telah dilakukan melalui berbagai upaya yang mencakup aspek lintas sektor, lintas wilayah, antarwaktu, kelembagaan, dan anggaran. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa isu penanggulangan banjir telah diakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RKPD, dan RTRW. Kondisi ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari proses pembangunan daerah. Menurut Nawawi & Panggabean (2025), integrasi isu kebencanaan ke dalam perencanaan pembangunan merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada peningkatan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi penanggulangan banjir didukung oleh beberapa faktor penting, yaitu dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kerja sama lintas sektor dan lintas wilayah, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan kebijakan pembangunan. Dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi menjadi faktor penting karena membantu pemerintah daerah dalam penyediaan pendanaan, dukungan teknis, dan sinkronisasi program pembangunan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Effendi & Rusfiana (2025) yang menjelaskan bahwa keberhasilan pengurangan risiko bencana di daerah sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Kerja sama lintas sektor yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan banjir tidak dapat ditangani oleh satu instansi secara mandiri. Bappeda, BPBD, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, serta berbagai lembaga lainnya harus bekerja secara terintegrasi agar program yang dijalankan dapat saling mendukung. Temuan ini sejalan dengan konsep *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Gasco-Hernandez et al (2022), bahwa penyelesaian masalah publik yang kompleks memerlukan kolaborasi antaraktor melalui koordinasi, komunikasi, dan pembagian peran yang jelas.

Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor pendukung yang cukup penting dalam pelaksanaan integrasi penanggulangan banjir (Kaman et al,2024). Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan gotong royong membersihkan drainase, menjaga lingkungan, serta mengikuti kegiatan mitigasi bencana menunjukkan adanya dukungan sosial terhadap program pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ginting et al. (2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan pengurangan risiko bencana sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat karena masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan risiko dan dampak bencana yang terjadi.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan beberapa faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas integrasi penanggulangan banjir. Faktor yang paling dominan adalah ego sektoral antarorganisasi perangkat daerah. Kondisi tersebut menyebabkan koordinasi belum berjalan secara optimal dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih program. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ginting & Wijayanti (2019) yang menemukan bahwa ego sektoral masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan pembangunan lintas sektor di daerah karena masing-masing instansi cenderung mempertahankan kepentingan organisasinya.

Selain ego sektoral, keterbatasan data yang terintegrasi juga menjadi hambatan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Data yang belum terhubung secara optimal menyebabkan sinkronisasi program menjadi kurang efektif. Menurut Ginting & Nawawi (2022), kualitas perencanaan pembangunan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi terpadu menjadi kebutuhan penting dalam mendukung perencanaan berbasis bukti (*evidence-based planning*) (Patwardhan et al,2023).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi penanggulangan banjir dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Palembang telah memiliki landasan yang cukup kuat dari sisi kebijakan dan dokumen perencanaan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan penguatan koordinasi antarinstansi, pengembangan sistem data yang lebih terintegrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta komitmen yang berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pembangunan daerah yang tangguh terhadap bencana hanya dapat diwujudkan melalui integrasi kebijakan yang konsisten, kolaborasi lintas sektor yang kuat, dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi penanggulangan banjir dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Palembang tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program dalam dokumen perencanaan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam membangun koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu penanggulangan banjir telah diakomodasi dalam dokumen RPJMD, RKPD, dan RTRW, sehingga secara formal telah menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah (Lechowska,2022).

Temuan lain menunjukkan bahwa dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi menjadi faktor penting dalam memperkuat integrasi penanggulangan banjir melalui bantuan pendanaan, dukungan teknis, dan sinkronisasi program pembangunan. Selain itu, partisipasi masyarakat juga berperan penting melalui kegiatan gotong royong, pemeliharaan drainase, serta keterlibatan dalam kegiatan mitigasi bencana (Along et al,2024). Temuan ini sejalan dengan penelitian Madjid et al. (2024) yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengurangan risiko bencana.

Penelitian ini juga menemukan bahwa ego sektoral antar-OPD masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan integrasi. Perbedaan prioritas program antarinstansi menyebabkan koordinasi belum berjalan optimal. Selain itu, keterbatasan data yang terintegrasi dan keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan dalam penyusunan program yang terpadu. Temuan ini sejalan dengan Julian & Umar (2025) yang menjelaskan bahwa ketersediaan data yang terintegrasi sangat diperlukan dalam mendukung perencanaan pembangunan berbasis risiko bencana.

Menariknya, Pemerintah Kota Palembang telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut melalui penguatan koordinasi lintas sektor dalam forum Musrenbang, pengembangan sistem informasi data terpadu, serta optimalisasi sumber pendanaan. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat integrasi penanggulangan banjir dalam perencanaan pembangunan (Watanabe et al,2022).

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi penanggulangan banjir di Kota Palembang tidak hanya bergantung pada dokumen perencanaan yang tersedia, tetapi juga pada sinergi kelembagaan, dukungan sumber daya, dan partisipasi masyarakat yang berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai integrasi penanggulangan banjir dalam rencana pembangunan daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dapat disimpulkan bahwa integrasi penanggulangan banjir telah menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Penanggulangan banjir tidak hanya dipandang sebagai upaya penanganan bencana semata, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses integrasi telah dilakukan melalui berbagai mekanisme perencanaan dan koordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala.

Upaya Pemerintah Daerah Kota Palembang dalam mengintegrasikan penanggulangan banjir ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah telah dilakukan melalui integrasi lintas sektor, lintas wilayah, antarwaktu, kelembagaan, dan anggaran. Integrasi tersebut terlihat dari masuknya program dan kegiatan penanggulangan banjir ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, dan RTRW. Selain itu, koordinasi antarinstansi juga telah dilakukan melalui forum perencanaan seperti Musrenbang, forum perangkat daerah, dan rapat koordinasi teknis. Meskipun demikian, implementasi integrasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

Faktor pendukung integrasi penanggulangan banjir di Kota Palembang meliputi dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kerja sama lintas sektor dan lintas wilayah, partisipasi masyarakat, serta keberadaan kebijakan yang berkelanjutan. Sementara itu, faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi ego sektoral antarorganisasi perangkat daerah, keterbatasan data yang terintegrasi, keterbatasan anggaran, serta perubahan kebijakan dan kepemimpinan yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan program. Berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi tidak hanya ditentukan oleh aspek perencanaan, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, koordinasi, dan ketersediaan sumber daya.

Dalam mengatasi berbagai hambatan tersebut, Pemerintah Kota Palembang telah melakukan sejumlah upaya strategis, antara lain melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, pengembangan sistem informasi data yang lebih terintegrasi, optimalisasi pendanaan program penanggulangan banjir, serta penguatan keberlanjutan program melalui dokumen perencanaan daerah. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat integrasi penanggulangan banjir ke dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa integrasi penanggulangan banjir di Kota Palembang telah memiliki dasar yang cukup kuat secara formal, namun masih memerlukan penguatan koordinasi, sinergi kelembagaan, konsistensi kebijakan, serta dukungan sumber daya agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang tangguh terhadap bencana banjir.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami hasil penelitian. Keterbatasan pertama terletak pada aspek waktu penelitian yang dilakukan dalam periode tertentu sehingga proses pengumpulan data dan wawancara hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal penelitian yang telah ditetapkan. Keterbatasan kedua berkaitan dengan ruang lingkup penelitian yang hanya difokuskan pada Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sehingga hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasikan pada daerah lain yang memiliki karakteristik geografis, kelembagaan, dan permasalahan banjir yang berbeda.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh para informan. Oleh karena itu, hasil penelitian dipengaruhi oleh pengalaman, pemahaman, dan perspektif masing-masing informan terhadap proses integrasi penanggulangan banjir dalam perencanaan pembangunan daerah. Penelitian ini juga berfokus pada aspek integrasi penanggulangan banjir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga belum membahas secara mendalam efektivitas pelaksanaan program penanggulangan banjir maupun dampaknya terhadap pengurangan risiko banjir secara kuantitatif.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada integrasi penanggulangan banjir dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Palembang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian pada tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi lain yang memiliki karakteristik risiko banjir yang berbeda sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik integrasi penanggulangan banjir dalam perencanaan pembangunan daerah.

Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengkaji efektivitas implementasi program penanggulangan banjir yang telah diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk dampaknya terhadap pengurangan risiko banjir dan peningkatan ketahanan wilayah. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengembangkan pendekatan yang lebih beragam, seperti metode campuran (*mixed methods*) atau pendekatan kuantitatif, guna memperoleh hasil yang lebih mendalam dan terukur. Penelitian berikutnya juga dapat menambahkan aspek lain yang berpengaruh terhadap keberhasilan integrasi penanggulangan banjir, seperti kapasitas kelembagaan, tata kelola kolaboratif, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, perubahan tata guna lahan, serta kebijakan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian mengenai Integrasi Penanggulangan Banjir dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Kota Palembang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palembang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palembang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang, serta seluruh informan yang telah bersedia memberikan informasi dan data yang diperlukan selama proses penelitian.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, pihak akademik, serta seluruh pihak yang telah memberikan arahan, masukan, dukungan, dan motivasi selama proses penyusunan penelitian hingga selesai. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dan manajemen bencana, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan integrasi penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Along, N. Z. B., Ahmed, I., & MacKee, J. (2024). Flood knowledge management by multiple stakeholders: an example from Malaysia. *International journal of disaster resilience in the built environment*, *15*(1), 141-157. https://doi.org/10.1108/IJDRBE-08-2021-0102

Alshaikh, R. Z., Abdulmunem, S. A., & Alkinani, A. S. (2023). A review on urban planning and its role in managing flood risks. Urban Planning and Construction, 1(1), 1-8. https://doi.org/10.55121/upc.v1i1.104

Al-Mughairi, H., & Bhaskar, P. (2025). Exploring the factors affecting the adoption AI techniques in higher education: insights from teachers' perspectives on ChatGPT. Journal of Research in Innovative Teaching & Learning, 18(2), 232-247. https://www.emerald.com/jrit/article/doi/10.1108/JRIT-09-2023-0129/1254182

Badan Pusat Statistik Kota Palembang. (2025). Kota Palembang dalam angka 2025. BPS Kota Palembang.

Bonfanti, R. C., Oberti, B., Ravazzoli, E., Rinaldi, A., Ruggieri, S., & Schimmenti, A. (2023). The role of trust in disaster risk reduction: a critical review. International journal of environmental research and public health, 21(1), 29. https://www.mdpi.com/1660-4601/21/1/29

Effendi, A. R., & Rusfiana, Y. (2025). Kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pada Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Alam Di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah (Doctoral dissertation, IPDN). http://eprints.ipdn.ac.id/23479/’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Firdausy, F. A., & Alia, R. S. P. (2024). Program Pencegahan Banjir: Tinjauan Efektivitas Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(11), 170-186. https://doi.org/10.5281/zenodo.12577755

Gasco-Hernandez, M., Gil-Garcia, J. R., & Luna-Reyes, L. F. (2022). Unpacking the role of technology, leadership, governance and collaborative capacities in inter-agency collaborations. Government Information Quarterly, 39(3), 101710. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X22000430

Ginting, A. H., & Nawawi, S. (2022). Optimalisasi BUMDes sebagai strategi peningkatan perekonomian menekan kemiskinan di Kabupaten Pohuwato. *Jurnal Registratie*, *4*(2), 64-76. https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v4i2.2817

Ginting, A. H., Wardana, D., & Zainal, Z. (2020). Strategi pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata alam Teluk Jering di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 10(1), 211-219. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v10i1.874

Ginting, A. H., & Wijayanti, T. D. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara. TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan, 42-57. https://doi.org/10.33701/jtp.v11i2.695

Julian, Y. A., & Umar, G. (2025). Peran Sistem Tata Kelola Lingkungan Berbasis Data Spasial dalam Perencanaan Pembangunan di Kawasan Urban. Journal of Current Research in Management, Policy, and Social Studies, 2(1), 1-8. https://ejournal.hakhara-institute.com/MPSS/article/view/70

Kaman, Z. K., Khanm, T., Mokhtar, S. B., Samsuddin, S. A., & Ali, Z. (2024). Factors Influencing Community Participation in Dam Failure Flood Risk Management: Challenges and Recommendations. *International Journal for Disaster and Development Interface*, *4*(2), 140-161. https://doi.org/10.53824/ijddi.v4i2.86

Kamil, E. M., Asysyauki, A. H., & Diem, A. F. (2023). Urban design approach to flood problem in Palembang City. Jurnal TekstuReka, 1(1), 14-24. https://doi.org/10.32502/tekstureka.v0i0.6283

Lechowska, E. (2022). Approaches in research on flood risk perception and their importance in flood risk management: a review. Natural Hazards, 111(3), 2343-2378. https://link.springer.com/article/10.1007/s11069-021-05140-7

Madjid, U., Kawuryan, M. W., Averus, A., & Triyanto, T. (2024). Communication in Digital-Based Public Services in Regional Government of West Java Province. TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan, 48-61. https://ejournal.ipdn.ac.id/JTP/article/view/3778

Maharani, R., & Suhendi, D. (2025). Mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (Tesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri). http://eprints.ipdn.ac.id/20994/

Nawawi, M., & Panggabean, Y. N. (2025). Peran satuan perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri). http://eprints.ipdn.ac.id/23481/

Patwardhan, B., Wieland, L. S., Aginam, O., Chuthaputti, A., Ghelman, R., Ghods, R., ... & Acharya, R. (2023). Evidence-based traditional medicine for transforming global health and well-being. Journal of Integrative and Complementary Medicine, 29(9), 527-530. https://doi.org/10.1089/jicm.2023.29121.editorial

Rosyida, A., & Nurmasari, R. (2019). Analisis Perbandingan Dampak Kejadian Bencana Hidrometeorologi dan Geologi di Indonesia Dilihat Dari Jumlah Korban (Studi: Data Kejadian Bencana Indonesia 2018): Studi: Data Kejadian Bencana Indonesia 2018. Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana, 10(1), 12-21. https://jdpb.bnpb.go.id/index.php/jurnal/article/view/127

Saad, M. S. H., Ali, M. I., Razi, P. Z., Ramli, N. I., & Bawono, A. S. (2024). Integrated approach to flood risk management: A comprehensive thematic review in the Malaysia Context. International Journal of Engineering Technology and Natural Sciences, 6(1), 1-10. https://doi.org/10.46923/ijets.v6i1.337

Sanahan, M. G., & Simbolon, H. (2024). Tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (Tesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri). Repository Institut Pemerintahan Dalam Negeri. http://eprints.ipdn.ac.id/19346/

Saputro, M. G. (2023). Efektivitas program penanggulangan bencana banjir di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. *IPDN Kampus Jatinangor,* 1–12. http://eprints.ipdn.ac.id/14379/

Tenau, A. S. (2025). Implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya. *IPDN. http://eprints.ipdn.ac.id/23020/*

Watanabe, N., Mo, F., & McKenna, M. K. (2022). Impact of manufacturing procedures on CAR T cell functionality. Frontiers in immunology, 13, 876339. https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.876339

Zulaeha, M., Ariany, L., Dwifama, A. H., Falmelia, R. A., & Ridhani, M. S. (2022). Mitigasi bencana perspektif kebijakan publik dalam penanggulangan bencana banjir di Kalimantan Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah,* *7*(3), 150–159.* https://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/snllb-lit/article/view/771/778